

DAFTAR BACAAN

- Harsono, Boedi , 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksannya*, Jakarta, Djambatan, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *Penelitian Hukum*, Majalah YURIDIKA, Vol.16 no.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Merokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Mu'adi Sholih, 2010, *Penyelesaian Sengketa : Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya.
- Perangin Rangin, Efendi, 1987, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Parlindungan, AP. 1973 *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni. Bandung.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Santoso, Urip, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2011, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Surabaya, PT. Revka Petra Media.
- Santoso, Urip, 2015, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif regulasi, wewenang, dan Sifat Akta)*, Surabaya, PT. Revka Petra Media.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soemitro, Ronny Harjito, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, Ramlan, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang *Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2013, tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643).

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan tengah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang
Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. (Lembaran daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2001 Nomor 59).

Lain-Lain :

www.kotawaringinbaratkab.go.id

Buku Panduan “Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak
Adat di Atas Tanah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2013

Materi Kuliah Urip Santoso , Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. FH Unair.
Desember 2014

